

ANALISIS PENGARUH STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENGUNGKAPAN KONVERGENSI IFRS PADA LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

Anggita Pitasari, Aditya Septiani¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to analyse how corporate governance structures affect the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income. This research is the development of a study conducted by Al Akra et al. (2010) and Prawinandi et al. (2012).

Data analysis method used is descriptive analysis method and hypothesis testing. Tests performed using SPSS release 16. Overall sample of 40 service companies used in this study.

The results of this study showed that the average level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income is 50.61 %. The results of multiple regression analysis showed that the structure of corporate governance which affect the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income is the number of audit committee members and the number of audit committee meetings. Meanwhile, a variable number of commissioners, the proportion of independent commissioners, the number of commissioners meeting, leverage, liquidity, and profitability are not significantly influence with the level of disclosure compliance convergence of IFRS in statements of comprehensive income.

Keywords : Corporate governance structure , Level of disclosure compliance, Convergence of IFRS , Statements of Comprehensive Income

PENDAHULUAN

Era globalisasi saat ini menuntut adanya suatu sistem akuntansi internasional yang dapat diberlakukan secara internasional di setiap negara, atau diperlukan adanya harmonisasi terhadap standar akuntansi internasional, dengan tujuan agar dapat menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah dalam melakukan analisis kompetitif dan hubungan baik dengan pelanggan, *supplier*, investor, dan kreditor (Gamayuni, 2009). Menurut Gamayuni (2009), semua perusahaan *go public* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2012.

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Adina dan Ion, 2008), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2010). Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan yang lebih tinggi. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu *corporate governance* untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan (Hamzah dan Suparjan, 2009).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Penelitian ini berfokus pada laporan laba rugi komprehensif karena laporan laba rugi komprehensif merupakan laporan yang selalu diperhatikan oleh *stakeholders* dalam

¹ *Corresponding author*

annual report sebagai pedoman mereka dalam mengambil keputusan. Selain itu, laporan laba rugi komprehensif juga menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode pelaporan.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Menurut Herawaty (2008), *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem *checks and balances*, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalam cara yang bertanggungjawab secara sosial dalam semua bidang kegiatan bisnis mereka (Solomon, 2007).

Pemisahan kepemilikan antara *principal* dengan agen cenderung akan menimbulkan konflik keagenan. Sama halnya dengan investor dan manajemen perusahaan. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa pihaknya tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi kinerja manajemen dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor.

Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi.

Teori agensi merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan antara *principal* dan manajemen. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa manajemen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan. Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executif Officer* (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₁ : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 disebutkan bahwa, dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Keberadaan Komisaris Independen dipandang lebih efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan suatu perusahaan dengan menuntut adanya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan.

Agency theory menjelaskan perlunya praktik pengungkapan laporan keuangan oleh manajemen kepada para pemegang saham, investor maupun pihak lain yang berkepentingan (Diyanti, 2010). Praktik pengungkapan perlu dilakukan untuk menghindari asimetri informasi antara manajemen dengan *stakeholders*. Dalam hal ini proporsi komisaris independen memegang peran penting dalam perusahaan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga dapat meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₂ : Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak

dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003).

Dalam praktik *corporate governance*, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan semakin mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H_3 : Jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Dalam Salinan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER – 01/MBU/2011, disebutkan bahwa Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi. Dalam hal ini, kinerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris akan dapat dilihat efektivitasnya melalui kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Berdasarkan teori agensi, agen harus mampu memberikan keyakinan kepada investor, bahwa agen tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, agar manajemen dapat memberi keyakinan kepada investor maka diperlukan pertemuan rutin dewan komisaris. Hal ini dilakukan agar dewan komisaris dapat terus memantau kinerja manajemen untuk melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi terhadap investor. Semakin banyak jumlah rapat dewan komisaris akan memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H_4 : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS pada Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Alijoyo (2003), Komite Audit harus mengadakan rapat sedikitnya satu kali setiap kuartal. Hal ini menyiratkan bahwa komite audit wajib mengadakan pertemuan minimal satu kali dalam tiga bulan agar dapat memantau tugas dan fungsi dari Komite Audit tersebut.

Teori agensi mensyaratkan pengungkapan yang lengkap dan jelas dalam laporan keuangan. Dalam hal ini, agar dapat memberikan transparansi dalam laporan keuangan maka perlu didukung oleh adanya agenda program kerja tahunan dari komite audit serta keteraturan rapat yang diadakan oleh komite audit. Oleh karena itu, semakin tinggi intensitas pertemuan yang diadakan oleh komite audit diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas, yaitu:

H_5 : Jumlah rapat komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Pengukuran variabel pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif menggunakan teknik *scoring*, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan akan diberi tanda N/A (*Not Applicable*).

$$\text{MANDSCR}_{BY} = \frac{\sum \text{SCR}_{BY}}{\sum \text{MAX}_{BY}} \times 100\%$$

Keterangan:

- MANDSCR_{BY} : Skor pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif perusahaan B pada tahun Y
 SCR_{BY} : Jumlah item yang diungkapkan perusahaan B pada tahun Y.
 MAX_{BY} : Nilai maksimum yang mungkin dicapai perusahaan B pada tahun Y.

Menurut KNKG (2006), jumlah anggota dewan komisaris diukur dengan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan.). Indikator proporsi komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardhani (2006) yaitu proporsi komisaris independen dibandingkan dengan total jumlah komisaris dalam suatu perusahaan di periode t. Pada penelitian ini indikator untuk mengukur jumlah anggota komite audit sesuai dengan penelitian Zaluki dan Hussin (dikutip oleh Prawinandi *et al.*, 2012) yaitu jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. Penelitian ini menggunakan indikator untuk mengukur jumlah rapat dewan komisaris sesuai dengan penelitian Ettredge *et al.* (2010) yaitu jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu tahun. Indikator untuk mengukur jumlah rapat komite audit yang digunakan sesuai dengan penelitian Ettredge *et al.* (2010) yaitu jumlah rapat komite audit yang diselenggarakan dalam jangka waktu satu tahun.

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol *leverage*, likuiditas, dan profitabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur *leverage* sesuai dengan penelitian Prawinandi *et al.* (2012) yaitu dengan menggunakan rasio total utang terhadap total ekuitas perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur likuiditas sesuai dengan penelitian Al Akra *et al.* (2010) yaitu dengan menggunakan rasio *current assets* terhadap *current liabilities*. Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas sesuai dengan penelitian Al Akra *et al.* (2010) yaitu dengan menggunakan *return on equity* (ROE).

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010, 2011 dan 2012. Jumlah anggota populasi dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 236 perusahaan.

Sampel yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Kriteria sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan jasa yang menyediakan *annual report* dan laporan keuangan ke BEI dan juga mengungkapkan struktur *corporate governance* dalam *annual report*-nya. Jumlah sampel yang diperoleh berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu sebanyak 40 perusahaan.

Metode Analisis

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Persamaan regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{MANDSCR} = b_0 + b_1\text{DWNKOM} + b_2\text{KOMIND} + b_3\text{KMTAUD} + b_4\text{RPTDWN} + b_5\text{RPTAUD} + b_6\text{LEV} + b_7\text{LIK} + b_8\text{PROF} + e$$

Keterangan Notasi Persamaan Regresi Berganda :

- MANDSCR = *Mandatory Disclosure IFRS*
 DWNKOM = Jumlah anggota Dewan Komisaris
 KOMIND = Proporsi Komisaris Independen
 KMTAUD = Jumlah Anggota Komite Audit

RPTDWN	= Jumlah Rapat Dewan Komisaris
RPTAUD	= Jumlah Rapat Komite Audit
LEV	= <i>Leverage</i>
LIK	= Likuiditas
PROF	= Profitabilitas
b_0	= Konstanta
$b_1 - b_8$	= Koefisien Regresi
e	= <i>error</i>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan, yaitu perusahaan jasa yang menyediakan *annual report* dan laporan keuangan ke BEI tahun 2010-2012 dan juga mengungkapkan struktur *corporate governance* dalam *annual reportnya*, maka diperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Daftar Perusahaan yang Digunakan sebagai Sampel dalam Penelitian

No.	Keterangan	
1.	Jumlah perusahaan jasa yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012	236
2.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah anggota dewan komisaris	-
3.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan proporsi komisaris independen	-
4.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah anggota komite audit	-
5.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah rapat dewan komisaris	25
6.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah rapat komite audit	29
7.	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria variabel kontrol <i>leverage</i>	4
8.	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria variabel kontrol likuiditas	45
9.	Perusahaan yang tidak memenuhi kriteria variabel kontrol profitabilitas	37
10.	Perusahaan yang tidak menyajikan <i>annual report</i> dan laporan keuangan di website BEI pada tahun 2010, 2011 atau 2012	56
	Jumlah perusahaan yang tidak memenuhi kriteria	(196)
	Jumlah sampel	40
	Total sampel (40 perusahaan x 3 tahun)	120

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2014

Tabel 2 menjelaskan hasil perhitungan statistik deskriptif variabel tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada tahun 2010 – 2012:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Konvergensi IFRS

Tahun	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
2010	0,31	0,64	0,39	0,065
2011	0,39	0,74	0,54	0,087
2012	0,36	0,73	0,58	0,094
Total	0,31	0,74	0,50	0,116

Sumber: Data yang diolah, 2014

Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa telah terjadi kenaikan tingkat kepatuhan pengungkapan untuk tahun 2010 sampai dengan 2012. Rata-rata tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yang diperoleh yaitu sebesar 0,5061 atau 50,61%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam satu periode laporan keuangan, perusahaan telah mengungkapkan sebanyak 50,61% item pengungkapan konvergensi IFRS. Dengan meningkatnya tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS maka dapat memberikan keuntungan bagi investor dan manajemen. Pengungkapan wajib yang lebih luas dapat menggambarkan kinerja perusahaan secara lengkap dan jelas sehingga kepercayaan investor terhadap manajemen akan meningkat.

Tabel 3
Statistik Deskriptif Variabel Independen dan Variabel Kontrol

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
DWNKOM	120	2.0000	10.0000	4.5000	1.6501
KOMIND	120	0.2000	0.7500	0.4279	0.1197
KMTAUD	120	2.0000	6.0000	3.3083	0.8178
RPTDWN	120	1.0000	29.0000	6.4667	4.5001
RPTAUD	120	2.0000	57.0000	7.1667	6.8726
LEV	120	0.0100	19.7600	1.8002	2.7953
LIK	120	0.3783	9.1400	2.0996	1.6825
PROF	120	0.0040	14.4000	0.2830	1.3048

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2014

Deskripsi Variabel

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa perusahaan sampel telah memenuhi ketentuan struktur *corporate governance*, yaitu dengan memiliki dewan komisaris rata-rata empat sampai lima orang, porporisi komisaris independen rata-rata lebih dari 30%, memiliki anggota komite audit rata-rata sebanyak tiga orang, dan telah mengadakan rapat dewan komisaris dan rapat komite audit secara rutin. Perusahaan yang telah memenuhi peraturan terkait *corporate governance* maka akan melakukan pengungkapan konvergensi IFRS secara lengkap dan jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi kepada pemegang saham.

Selain itu, rata-rata perusahaan memiliki *leverage* sebesar 1,8002 kali. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan pendanaan dari hutang dibandingkan modal sendiri. Perusahaan sampel rata-rata memiliki rasio likuiditas sebesar 2,09 dimana angka ini menunjukkan bahwa perusahaan dalam kondisi likuid. Perusahaan sampel rata-rata juga dapat menghasilkan laba sebesar 28,30% dibandingkan dengan total ekuitas.

Pembahasan Hasil Penelitian

Tabel 4
Hasil Uji Hipotesis

Variabel	Nilai Signifikansi ($\alpha = 5\%$)
DWNKOM	.389
KOMIND	.109
KMTAUD	.007*
RPTDWN	.548
RPTAUD	.040*
LEV	.190
LIK	.248
PROF	.652

Keterangan: *) Signifikan

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif dengan nilai signifikansi sebesar 0,389. Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena jumlah anggota dewan komisaris perusahaan sampel rata-rata berjumlah empat sampai lima orang. Jumlah ini lebih besar dari ketentuan minimal jumlah anggota dewan komisaris yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu satu orang. Namun, jumlah anggota dewan komisaris yang besar juga akan sulit dalam mencapai kesepakatan dan membuat keputusan. Hal ini dikarenakan setiap dewan komisaris pasti memiliki pertimbangan tersendiri dalam pengambilan keputusan sehingga akan membutuhkan waktu yang lama dalam pengambilan keputusan. Apabila proses pengambilan keputusan membutuhkan waktu yang lama, maka akan sulit bagi dewan komisaris untuk mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian

Prawinandi *et al.* (2012) yang juga tidak menemukan pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan.

Hasil pengujian terhadap hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,109. Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena proposi komisaris independen perusahaan sampel yang rata-rata sebesar 42,79% belum cukup untuk melaksanakan fungsi pengawasan bersama dewan komisaris. Perusahaan sampel rata-rata memiliki proporsi komisaris independen yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Hal ini dapat terjadi karena pemegang saham lebih mempercayakan perusahaan kepada komisaris dari internal perusahaan karena dianggap lebih mengetahui kondisi perusahaan secara keseluruhan. Namun, apabila jumlah komisaris independen yang kecil tetapi memiliki tingkat independensi yang tinggi maka akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Utami *et al.* (2012) dimana proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,007. Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena jumlah anggota komite audit perusahaan sampel rata-rata telah memenuhi ketentuan minimal yaitu tiga orang dan telah mampu untuk memberikan pendapat profesional yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris. Dalam hal ini komite audit mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Al Akra *et al.* (2010) yang menyatakan jumlah anggota komite audit merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib IFRS.

Hasil pengujian terhadap hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,548. Alasan mendasar dari hasil penelitian ini dapat disebabkan karena jumlah rapat dewan komisaris perusahaan sampel rata-rata tidak memenuhi persyaratan minimal untuk mengadakan pertemuan sebanyak dua belas kali dalam satu tahun. Namun, apabila dengan jumlah rapat yang kurang memenuhi ketentuan minimal dapat dilaksanakan secara efektif serta dapat berkoordinasi dan berkomunikasi baik dengan pihak manajemen maka tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dapat meningkat. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Utami *et al.* (2012) yang menyatakan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS.

Hasil pengujian terhadap hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS dengan nilai signifikansi sebesar 0,040. Alasan mendasar untuk hasil penelitian ini dapat disebabkan karena jumlah rapat komite audit yang lebih besar dari jumlah rapat dewan komisaris dapat menjadi aktivitas untuk membahas mengenai penyusunan laporan keuangan perusahaan dan dikomunikasikan atau diterapkan dalam langkah nyata pengawasan yang optimal. Dalam hal ini, komite audit mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris. Oleh karena itu, tindak lanjut dari pertemuan komite audit dapat menjadi salah satu pertimbangan yang juga penting untuk diimplementasikan dalam bentuk pengawasan yang lebih baik. Sehingga manajemen akan menyajikan laporan keuangan dengan pengungkapan yang lebih luas. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ettredge *et al.* (2010) yang menyatakan frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan wajib IFRS.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur corporate governance yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif yaitu jumlah anggota komite audit dan jumlah rapat komite audit. Hal ini berarti perusahaan yang memiliki komite audit dan telah memenuhi syarat minimal jumlah rapat komite audit akan cenderung mengungkapkan item wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif

secara luas. Sedangkan variabel lain yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. Hal ini berarti perusahaan yang telah memenuhi peraturan mengenai jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan jumlah rapat dewan komisaris belum mampu untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu, penelitian ini hanya berfokus pada laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan PSAK yang berkaitan dengan laporan laba rugi komprehensif, sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS secara keseluruhan. Selain itu, tidak adanya informasi eksplisit dari pengungkapan, membuat subyektifitas penilaian muncul dalam meneliti pengungkapan konvergensi IFRS.

Dengan mempertimbangkan hasil analisis, kesimpulan dan keterbatasan yang telah dikemukakan di atas, maka saran yang diberikan untuk penelitian berikutnya yaitu perluasan objek penelitian dengan meneliti secara keseluruhan laporan keuangan, tidak hanya PSAK yang berkaitan dengan laporan laba rugi komprehensif.

REFERENSI

- Adina, P., dan P. Ion. 2008. Aspect Regarding Corporate Mandatory and Voluntary Disclosure. *Annals Faculty of Economics Journal* 3 (1): 1407-1411.
- Al- Akra, M., I. A., Eddie dan M. J. Ali. 2010. The Influence of The Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance: Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 7 (1): 1-20.
- Alijoyo, F.A. 2003. Keberadaan dan Peran Komite Audit Dalam Rangka Implementasi GCG. *Seminar Nasional FKSPI BUMN/BUMD Wilayah Jawa Timur*.
- Deloitte Touche Tohmatsu.2010. *International Financial Reporting Standards. Presentation and Disclosure Checklist 2010*. <http://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2010/ifrs-presentation-and-disclosure-checklist-2010>. Diakses 2 Desember 2013.
- _____.2011. *International Financial Reporting Standards. Workbook 2011*. <http://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2011/ifrs-compliance-presentation-and-disclosure-checklist-2011>. Diakses 2 Desember 2013.
- _____.2012. *International Financial Reporting Standards. Workbook 2012*. <http://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2012/ifrs-compliance-presentation-and-disclosure-checklist-2012>. Diakses 2 Desember 2013.
- Diyanti, Ferry. 2010. Mekanisme *Good Corporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan *Mandatory Disclosure*: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI. Publikasi Ilmiah Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomi Unversitas Brawijaya.
- Ettredge, M., K. Johnstone, M. Stone dan Q. Wang. 2010. The Effects of Firm Size, Corporate Governance Quality, and Bad News on Disclosure Compliance. *Review of Accounting Studies, Forthcoming*:1-34.
- Gamayuni, R. R. 2009. Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia Menuju *International Financial Reporting Standards*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 14 (2): 153-166.



- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro ISBN : 979.704.300.2
- Hamzah, M.Z., dan Suparjan, A. 2009. Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Struktur Modal. *Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi*, Vol. 9, No. 1, April 2009.
- Herawaty, Vinola. 2008. Peran Praktek *Corporate Governance* Sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2, November 2008.
- Komite Nasional Kebijakan Governance. 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Kebijakan Governance.
- Menteri Negara BUMN. 2011. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/dan/files/Pdf/PER-01_MBU_2011%20PENERAPAN%20TATA%20KELOLA%20PERUSAHAAN%20YANG%20BAIK%20-%20GCG.pdf. Diakses 23 Oktober 2013.
- Prawinandi, W., Suhardjanto, D., dan H. Triatmoko. 2012. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Solomon, Jill. 2007. *Corporate Governance and Accountability*. 2nd Edition. John Wiley & Sons, Ltd.
- Utami, W. D., Suhardjanto, D., S. Hartoko. 2012. "Investigasi Dalam Konvergensi IFRS Di Indonesia: Tingkat kepatuhan pengungkapan dan Kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*." *Simposium Nasional Akuntansi XV*.
- Wardhani, Ratna. 2006. "Mekanisme *Corporate Governance* dalam Perusahaan yang Mengalami Permasalahan Keuangan (*Financially Distressed Firms*)". *Simposium Nasional Akuntansi IX*.

www.iaiglobal.or.id

www.idx.co.id